

## Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* pada Praktik *Tax Avoidance*

I Gede Ambara Cita<sup>1</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Indonesia.  
Email: ambaracita22@gmail.com

Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Indonesia.

### ABSTRAK

Usaha meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya secara legal disebut *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* pada *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR). Penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 105 sampel. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan *financial distress* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh positif pada *tax avoidance*, dan komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Financial Distress*; Kepemilikan Institusional; Komisaris Independen; Komite Audit; *Tax Avoidance*.

### *The Effect of Financial Distress and Good Corporate Governance on Tax Avoidance Practices*

### ABSTRACT

Efforts to minimize tax payments from nominal should be legally called *tax avoidance*. This study aims to examine the effect of *financial distress* and *good corporate governance* on *tax avoidance* that is proxied by the *cash effective tax rate* (CETR). This research was conducted in the *consumer goods* sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. Determination of the number of samples using *purposive sampling* method and obtained a sample of 105 samples. Data were analyzed using *multiple linear regression analysis*. Based on the results of the analysis found *financial distress* has a negative effect on *tax avoidance*, *institutional ownership* has a positive effect on *tax avoidance*, *independent commissioners* have a positive effect on *tax avoidance*, and *audit committees* have a positive effect on *tax avoidance*.

Keywords : *Financial Distress*; *Institutional Ownership*; *Independent Commissioner*; *Audit Committee*; *Tax Avoidance*.



E-JA  
e-Jurnal Akuntansi  
e-ISSN 2302-8556

Vol. 29 No. 3  
Denpasar, Desember  
2019  
Hal. 912-927

Artikel masuk:  
25 Juni 2019

Tanggal diterima:  
07 Juli 2019

## PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar salah satunya adalah penerimaan pajak. Besar-kecilnya penerimaan negara dari pajak salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi perusahaan pajak menjadi perhatian yang cukup signifikan, karena bagi perusahaan pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga perusahaan menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menekan jumlah beban pajak yang harus dibayar.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yaitu suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self assessment system* yaitu wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung kewajiban pajak yang dimiliki dan memiliki pengetahuan mengenai pembayaran dan sebagainya hingga terpenuhi.

Persepsi masyarakat mengenai pajak masih banyak yang negatif. Masyarakat masih menganggap pajak sebagai pengurang dari penghasilan mereka dan bukan kewajiban yang harus dibayarkan. Persepsi negatif tersebut membuat masyarakat mengelola ulang pajaknya agar pajak yang dibayarkan tidak banyak. Upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sedangkan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara ilegal disebut dengan *tax evasion* (Maraya dan Yendrawati, 2016). *Tax avoidance* merupakan cara untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan yang sering digunakan. *Tax avoidance* merupakan metode yang legal dan sering digunakan. Penggunaan metode ini dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada aturan-aturan perpajakan (Santoso, 2014).

Meskipun legal, pemerintah mengharapkan agar perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Realisasi pemungutan pajak di Indonesia tidak sesuai dengan yang ditargetkan, tahun 2017 efektivitas pemungutan pajak hanya mencapai 89,4 persen. Wajib pajak berusaha seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (Arianandini dan Ramantha, 2018). Target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 dan 2017 disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan	Efektivitas Pemungutan Pajak (%)
2013	1.148,0		1.077,3	93,8
2014	1.246,0		1.143,0	91,7
2015	1.489,3		1.240,4	83,3
2016	1.539,2		1.285,0	83,5
2017	1.498,0		1.339,0	89,4

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Pada tahun 2016 pemerintah menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* yang dapat meningkatkan jumlah realisasi pemungutan pajak setelah mengalami penurunan selama tahun 2013 sampai 2015. Tahun 2016 terlihat peningkatan realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target. Seharusnya target tersebut dapat terealisasi dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Sari (2015) menyebutkan salah satu faktornya adalah *Financial Distress*. Indikasi awal akan terjadinya kebangkrutan dengan gejala kesulitan keuangan atau likuiditas disebut dengan *Financial Distress*. Shleifer dan Vishny (1997) dalam penelitiannya mendapat temuan mengenai adanya hubungan yang positif antara *financial distress* pada *tax avoidance*.

Perekonomian di dunia akan selalu mengalami keadaan pasang dan surut. Kondisi pelaku perekonomian juga tidak akan selamanya baik. Ketika krisis melanda banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau yang disebut dengan *financial distress*. Ketika perusahaan merasa bahwa tingkat kesulitan keuangan yang dialami semakin tinggi sehingga kemungkinan perusahaan tersebut bangkrut lebih tinggi maka praktik *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan (Brondolo, 2015). Hasil penelitian dari Meilia dan Adnan (2017) dalam penelitiannya yang mengangkat topik yang sama yaitu mengenai *tax avoidance* menemukan kesimpulan bahwa ketika *financial distress* suatu perusahaan meningkat, manajemen perusahaan tersebut cenderung melakukan *tax avoidance*.

Baik buruknya penerapan CG oleh perusahaan akan berdampak pada kelangsungan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ketika *corporate governance* tidak diterapkan dengan baik maka akan berdampak pada turunnya kinerja keuangan perusahaan dan dalam jangka panjang akan berakhir pada *financial distress* (Radifan, 2015). *Corporate governance* dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal (Fadhilah 2014). *Corporate governance* secara internal yaitu melakukan pengendalian melalui struktur organisasi dan proses internal. *Corporate governance* secara eksternal yaitu melakukan pengendalian melalui pasar atau pemegang saham.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Wahyudi, 2014). Dewan komisaris melakukan pembentukan sebuah komite yang memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris dan komite ini disebut dengan komite audit. Tanggung jawab yang dipegang oleh komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan tugasnya mengawasi perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Manajemen perusahaan menyusun laporan keuangan dibawah pengawasan komite audit.

Terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Reza, 2012), ditemukan adanya hubungan yang negatif antara besarnya persentase anggota dewan komisaris pada *tax avoidance*.

Timothy (2010) dalam penelitiannya justru menemukan hubungan positif antara persentase anggota dewan komisaris pada *tax avoidance*.

Dengan memiliki harga saham yang rata-rata tinggi, sektor *Consumer Goods* dipilih sebagai objek yang akan diteliti. Rata-rata harga saham yang tinggi ini memiliki pengaruh yang besar pada penilaian kemajuan perusahaan manufaktur. Harga saham di berbagai sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 2 berikut

**Tabel 2. Harga Saham di Berbagai Sektor yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2015-2017**

Sector	Harga Saham (Rp)			
	2015	2016	2017	Rata-Rata
<i>Agriculture</i>	1719,262	1864,249	1616,307	1733,273
<i>Mining</i>	811,072	1384,706	1593,999	1263,259
<i>Basic Industry dan Chemicals</i>	407,839	538,189	689,219	545,082
<i>Miscellaneous Industry</i>	1057,275	1370,628	1381,177	1269,693
<i>Consumer Goods Industry</i>	2064,91	2324,281	2861,391	2416,861
<i>Property, Realestate dan Building Construction</i>	490,933	517,81	495,51	501,418
<i>Infrastructure, Utilities and Transportation</i>	981,333	1055,587	1183,708	1073,543
<i>Finance</i>	687,039	811,893	1140,837	879,923
<i>Trade dan Service</i>	849,527	860,654	921,589	877,257

Sumber: www.idx.co.id, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa sektor yang memiliki rata-rata harga saham tertinggi yaitu sektor *Consumer Goods*, dari tahun 2015 hingga 2017 rata-rata harga saham pertahun di perusahaan sektor *Consumer Goods* terus mengalami peningkatan. Peneliti termotivasi untuk meneliti sektor *Consumer Goods* karena ingin mengetahui apakah sektor *Consumer Goods* yang merupakan sektor dengan rata-rata saham tertinggi, melakukan penghindaran pajak.

Teori agensi dan teori legitimasi merupakan teori dasar yang digunakan dalam memahami isu tentang pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* pada praktik *tax avoidance*. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan pengertian dari teori agensi yaitu hubungan kontrak kerja sama antar *agent* dan *principal*. Dalam kontrak kerja ini *agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk menjalankan aktivitas perusahaan sesuai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh *principal*. Yang dimaksud dengan *principal* adalah pemberi wewenang yaitu pemegang saham, pemilik atau investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan. Yang dimaksud dengan *agent* disini adalah orang yang diberikan wewenang oleh *principal* yaitu manajer perusahaan.

Legitimasi adalah melakukan penyamaan persepsi atau pengertian akan suatu hal yang kemudian disesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku (Suchman, 1995). Suchman (1995) memiliki pendapat mengenai legitimasi yaitu hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dimana masyarakat memberikan sesuatu yang dicari atau diinginkan oleh perusahaan kepada perusahaan. Sistem perusahaan dengan legitimasi berarti perusahaan mengatur sistem dalam perusahaannya dengan orientasi bahwa perusahaan tersebut berpihak kepada masyarakat (Gray *et al*, 1996).

Masri dan Martani (2012) di dukung oleh penelitian dari Rani (2017) menyatakan pengaruh negatif *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan upaya *tax avoidance* ketika perusahaan tersebut berada pada posisi *financial distress* hal tersebut akan menyebabkan penurunan pada citra perusahaan. perusahaan yang merugi akan terbebas dari beban pajak penghasilan dan mendapatkan fasilitas kompensasi kerugian pada masa mendatang. Hipotesis yang dibangun adalah:

H<sub>1</sub> : *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Fadhilah (2014) menyatakan pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen di dalam perusahaan sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan meminimalisir peluang terjadinya *tax avoidance*. Hipotesis yang dibangun adalah:

H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Prakosa (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan. Hipotesis yang dibangun adalah:

H<sub>3</sub> : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Maharani dan Suardana (2014) menyebutkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ini di dukung oleh penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012), yang menyatakan bahwa komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap tindakan pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen pajak. Dalam pengawasannya, semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan akan pembuatan laporan keuangan perusahaan akan semakin besar dan kegiatan perusahaan terhadap *tax avoidance* semakin kecil. Hipotesis yang dibangun adalah:

H<sub>4</sub> : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

## METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini dilakukan pada BEI dengan meneliti perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI dengan mengakses laman [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang perusahaan *Consumer Goods* serta untuk memperoleh laporan keuangan tahunan perusahaan.

Objek pada penelitian ini adalah *tax avoidance*, *financial distress*, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017. Variabel terikat yang dipilih adalah *tax avoidance*. Variabel bebas yang dipilih adalah *financial distress*,

kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit.

Upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sedangkan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara ilegal disebut dengan *tax evasion* (Maraya dan Yendrawati, 2016). *Tax avoidance* merupakan cara untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan yang sering digunakan. *Tax avoidance* merupakan metode yang legal dan sering digunakan. Penggunaan metode ini dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada aturan-aturan perpajakan (Santoso, 2014).

*Tax avoidance* merupakan cara untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan namun tidak melanggar peraturan perpajakan dengan menuruti peraturan yang ada. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung melalui *cash effective tax rates* (CETR). Penggunaan CETR juga dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Chen *et al.*(2010) dan Minnick dan Noga(2010). CETR dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang diperagakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010), yaitu:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,t}{Pretax\ Income\ i,t} \dots\dots\dots (1)$$

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) dan Dewi dan Sari (2015) menyebutkan salah satu faktornya adalah *Financial Distress*. Indikasi awal akan terjadinya kebangkutan dengan gejala kesulitan keuangan atau likuiditas disebut dengan *Financial Distress*. Lanis dan Richardson (2013) dalam penelitiannya mendapat temuan mengenai adanya hubungan yang positif antara *financial distress* pada *tax avoidance*. Perekonomian di dunia akan selalu mengalami keadaan pasang dan surut. Kondisi pelaku perekonomian juga tidak akan selamanya baik. Ketika krisis melanda banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau yang disebut dengan *financial distress*.

Kondisi ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar (seperti kredit perdagangan atau beban bunga) disebut dengan *Financial distress*. *Financial distress* sendiri diukur dengan menggunakan Altman Z-Score (Altman & Hotchkiss, 2011), yaitu:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

A = Aset lancar-utang lancar / total aset

B = Laba ditahan / Total aset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D= Jumlah lembar saham x Harga per lembar saham / total utang

E = Penjualan / Total aset

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholder* pada akhir tahun (Wahyudi, 2014). Kepemilikan institusional merupakan institusi pendiri perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan dari perusahaan yang didirikan. Perhitungan kepemilikan institusional ini mengacu pada penelitian Carlson dan Bathala (1997) serta Khurana dan Moser (2009) dengan rumus sebagai berikut:

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Kepemilikan\ saham\ institusional}{Jumlah\ saham\ yang\ beredar} \dots\dots\dots (3)$$

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Perhitungan komisaris independen ini mengacu pada penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots (4)$$

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan pengawasan dalam menyusun laporan keuangan. Dewan komisaris melakukan pembentukan sebuah komite yang memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris dan komite ini disebut dengan komite audit. Tanggung jawab yang dipegang oleh komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan tugasnya mengawasi perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Manajemen perusahaan menyusun laporan keuangan dibawah pengawasan komite audit.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017. Jumlah perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 49 perusahaan. Metode *purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun periode pengamatan yaitu 2013-2017. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2013-2017 secara lengkap. Perusahaan *Consumer Goods* yang memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun 2013-2017. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga akan menghasilkan tarif pajak efektif terdistorsi (Richardson *et al*, 2015). Perusahaan *Consumer Goods* dengan nilai CETR kurang dari satu agar tidak menimbulkan masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997)

Data kuantitatif yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Data kualitatif yang digunakan berasal dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil analisis. Data sekunder berasal dari web, majalah, buku, dan jurnal penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui web resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance*
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien regresi variabel  $X_1, X_2, X_3,$  dan  $X_4$
- $X_1$  = *Financial Distress*
- $X_2$  = Kepemilikan Manajerial
- $X_3$  = Ukuran Dewan Komisaris
- $X_4$  = Komite Audit
- e = *Error*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi variabel dalam penelitian dilakukan pada variabel *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *tax avoidance*. Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i>	105	0,0832	0,7238	0,292917	0,1188735
<i>Financial Distress</i>	105	1,0510	5,6813	3,050382	1,0061156
Kepemilikan					
Institusional	105	0,0514	0,9818	0,713101	0,1992571
Komisaris Independen	105	0,2000	0,8000	0,419448	0,1241480
Komite Audit	105	3,0000	4,0000	3,085714	0,2812843
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Penelitian, 2019

*Tax avoidance* pada penelitian ini diproksikan dengan *cash effective tax rates* (CETR). Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum CETR sebesar 0,0832 dan nilai maksimum sebesar 0,7238. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,292917. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kas pajak dalam suatu perusahaan pajak sebesar 29,1917 persen dari laba sebelum pajaknya. Standar deviasi *tax avoidance* sebesar 0,1188735 nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data *tax avoidance* sudah merata.

Pengukuran *financial Distress* dilakukan dengan menggunakan proksi Altman *Z-Score*. Variabel *Financial Distress* memiliki nilai minimum sebesar 1,0510 dan memiliki nilai maksimum sebesar 5,6813. Variabel *financial distress* memiliki nilai rata-rata sebesar 3,0503. Nilai standar deviasi *financial distress* sebesar 1,00611 hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai *financial distress* yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 100,6%.

Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan besarnya presentase kepemilikan saham institusional. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,0514 dan nilai maksimum sebesar 0,9818. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7131. Standar deviasi sebesar 0,19925 nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kepemilikan institusional sudah merata.

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total jumlah komisaris. Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,2000 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,800. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4194. Standar deviasi sebesar 0,12414 nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data komisaris independen sudah merata.

Komite audit dalam penelitian ini dihitung dari jumlah komite audit yang berada di perusahaan. Variabel komite audit memiliki nilai minimum 3,0000 dan nilai maksimum sebesar 4,0000. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 3,0857. Standar deviasi sebesar 0,28128 nilai ini lebih rendah

dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data komite audit sudah merata.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,8344
Most Extreme Differences	Absolute	0,073
	Positive	0,073
	Negative	-0,053
Test Statistic		0,752
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,623

Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,752 dengan nilai signifikansi sebesar 0,623. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelima variabel berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Financial Distress (X <sub>1</sub> )	0,492	2,034
	Kepemilikan Institusional (X <sub>2</sub> )	0,408	2,449
	Komisaris Independen (X <sub>3</sub> )	0,731	1,367
	Komite Audit (X <sub>4</sub> )	0,923	1,083

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,620	0,054		11,491	0,000
	FD (X <sub>1</sub> )	0,139	0,071	0,272	1,966	0,052
	INST (X <sub>2</sub> )	0,053	0,084	0,096	0,628	0,531
	KIND (X <sub>3</sub> )	-0,055	0,077	-0,082	-0,721	0,472
	KoA (X <sub>4</sub> )	-0,074	0,057	-0,131	-1,296	0,198

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data Penelitian, 2019

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel *Financial Distress* sebesar 0,052, Kepemilikan institusional sebesar 0,531, nilai signifikansi variabel Komisaris independen sebesar 0,472, dan nilai signifikansi variabel komite audit sebesar 0,198. Nilai dari keempat variabel yang diujikan terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai yang dihasilkan telah melebihi 0,05.

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini disajikan pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,479 <sup>a</sup>	0,230	0,199	0,85095840	1,785

a. Predictors: (Constant), KoA, KIND, INST, FD  
b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 7 didapat nilai *Durbin Watson* sebesar 1,785, sehingga dapat disimpulkan nilai DW  $1,7617 < 1,785 \leq 2,2383$  yang diperoleh dalam model regresi ini bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini disajikan pada tabel 8 berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-0,163	0,086		-1,888	0,062
	FD (X <sub>1</sub> )	-0,353	0,113	-0,390	-3,115	0,002
	INST (X <sub>2</sub> )	-0,284	0,134	-0,291	-2,120	0,036
	KIND (X <sub>3</sub> )	-0,461	0,123	-0,386	-3,765	0,000
	KoA (X <sub>4</sub> )	-0,207	0,092	-0,206	-2,260	0,026

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 8 persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = -0,0163 - 0,353 X_1 - 0,284 X_2 - 0,461 X_3 - 0,207 X_4 + e$$

$\alpha$  menyatakan bahwa jika variabel *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit sama dengan nol, maka menunjukkan nilai *tax avoidance* akan berkurang.

Nilai koefisien  $\beta_1$  sebesar -0,353 menunjukkan jika nilai *financial distress* (X<sub>1</sub>) meningkat sebesar 1 satuan, maka CETR menurun sebesar 0,353 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin rendah nilai CETR mencerminkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya, sehingga penurunan nilai CETR perusahaan menunjukkan peningkatan tindakan *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan.

Nilai koefisien  $\beta_2$  sebesar -0,284 menunjukkan jika nilai kepemilikan institusional (X<sub>2</sub>) meningkat sebesar 1 satuan, maka CETR menurun sebesar 0,284 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin rendah

nilai CETR mencerminkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya, sehingga penurunan nilai CETR perusahaan perusahaan menunjukkan peningkatan tindakan *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan.

Nilai koefisien  $\beta_3$  sebesar -0,461 menunjukkan jika nilai komisaris independen ( $X_3$ ) meningkat sebesar 1 satuan, maka CETR menurun sebesar 0,461 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin rendah nilai CETR mencerminkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya, sehingga penurunan nilai CETR perusahaan perusahaan menunjukkan peningkatan tindakan *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan.

Nilai koefisien  $\beta_4$  sebesar -0,207 menunjukkan jika nilai komite audit ( $X_4$ ) meningkat sebesar 1 satuan, maka CETR menurun sebesar 0,207 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin rendah nilai CETR mencerminkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* dan sebaliknya, sehingga penurunan nilai CETR perusahaan perusahaan menunjukkan peningkatan tindakan *tax avoidance* (Y) yang dilakukan perusahaan.

Uji kelayakan model (F) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Model dikatakan layak apabila nilai signifikansi F atau *Probabilities value*  $< \alpha = 0,05$ .

Hasil uji kelayakan model (uji F) dalam penelitian ini disajikan pada tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,603	4	5,401	7,458	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	72,413	100	0,724		
	Total	94,016	104			

a. *Predictors: (Constant), Komite Audit, Financial Distress, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional*  
 b. *Dependent Variable: Tax Avoidance*

Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,458 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen beserta interaksinya berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model persamaan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen dan menjelaskan bagaimana arah hubungan antara variabel independen dan dependen. *R-Square* berada antara nol dan satu.

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini disajikan pada tabel 10 berikut.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,479 <sup>a</sup>	0,230	0,199	0,85095840

a. Predictors: (Constant), KoA, KIND, INST, FD

Sumber: Data Penelitian, 2019

Tabel 10 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,199 memiliki arti bahwa sebesar 19,9 persen variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *financial distress*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Sisanya sebesar 80,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			
1	(Constant)	-0,163	0,086			-1,888	0,062
	FD	-0,353	0,113	-0,390		-3,115	0,002
	INST	-0,284	0,134	-0,291		-2,120	0,036
	KIND	-0,461	0,123	-0,386		-3,765	0,000
	KoA	-0,207	0,092	-0,206		-2,260	0,026

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 11, dapat dijelaskan, Hipotesis pertama menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tabel 11 menunjukkan bahwa -0,353 sebagai nilai koefisien regresi dan didapatkan nilai *P-Value* sebesar 0,002 dimana memiliki nilai yang lebih rendah dari  $\alpha$  yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *Z-Score* memiliki pengaruh negatif pada CETR. Nilai koefisien regresi  $\beta_1$  sebesar -0,353 menunjukkan hubungan negatif antara *Z-Score* dengan CETR. Hasil pengujian bahwa *financial distress* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tabel 11 menunjukkan bahwa -0,284 sebagai nilai koefisien regresi dan didapatkan nilai *P-Value* sebesar 0,036 dimana memiliki nilai yang lebih rendah dari  $\alpha$  yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada CETR. Nilai koefisien regresi  $\beta_2$  sebesar -0,284 menunjukkan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan CETR. Hasil pengujian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tabel 11 menunjukkan -0,461 sebagai nilai koefisien regresi dan didapatkan nilai *P-Value* sebesar 0,000 dimana memiliki nilai yang lebih rendah dari  $\alpha$  yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif pada CETR. Nilai koefisien regresi  $\beta_3$  sebesar -0,461 menunjukkan hubungan negatif antara komisaris

independen dengan CETR. Hasil pengujian bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Tabel 11 menunjukkan bahwa -0,207 sebagai nilai koefisien regresi dan didapatkan nilai *P-Value* sebesar 0,026 dimana memiliki nilai yang lebih rendah dari  $\alpha$  yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada CETR. Nilai koefisien regresi  $\beta_4$  sebesar -0,207 menunjukkan hubungan negatif antara komite audit dengan CETR. Hasil pengujian bahwa komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Berdasarkan Tabel 11, variabel *corporate governance* diproksikan dengan *financial distress* (FD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,353 dengan nilai *P-Value* sebesar 0,002 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengujian bahwa *financial distress* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan, perusahaan yang telah menyesuaikan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap sosial dengan nilai dan norma sosial yang berlaku akan mendapat pengakuan atau legitimasi sehingga memperoleh citra positif (Lanis & Richardson, 2013). Perusahaan yang mengalami *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *Tax Avoidance*. Sebab perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* dalam kondisi *financial distress* semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi pernyataan Masri dan Martani (2012) yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan yang mengalami *financial distress* melakukan upaya *tax avoidance*, maka perusahaan dapat memperbesar risiko semakin memburuknya citra perusahaan dan memberikan sinyal negatif kepada investor atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan *cost of debt* perusahaan.

Berdasarkan Tabel 11, variabel *corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,284 dengan nilai *P-Value* sebesar 0,036 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengujian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Kaitannya dengan teori keagenan yaitu adanya konflik kepentingan, institusi pendiri perusahaan akan mementingkan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang menguntungkan mereka tanpa memperdulikan kepentingan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan dalam perusahaan, membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak. Institusi pendiri perusahaan sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui penggunaan metode dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba menjadi lebih kecil yang menyebabkan tindakan *Tax Avoidance* dilakukan.

Berdasarkan Tabel 11, variabel *corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen (KIND) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,461 dengan nilai *P-Value* sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengujian

bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi jumlah komisaris independen maka semakin besar tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak, dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan perusahaan akan merasa tertekan atas tanggung jawabnya, maka kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* semakin besar untuk dilakukan. Kaitannya dengan teori agensi yaitu munculnya masalah keagenan yang berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*), dimana keinginan dari agen yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh prinsipal akan memunculkan konflik kepentingan diantara keduanya. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 11, variabel *corporate governance* diprosksikan dengan komite audit (KoA) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,207 dengan nilai *P-Value* sebesar 0,026 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengujian bahwa komite audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Kaitannya dengan teori agensi yaitu munculnya masalah keagenan yang berupa asimetris informasi. Agen bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal, seolah-olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataan tidak demikian. Ketidaktahuan prinsipal memberikan celah untuk melakukan manipulasi laporan keuangan bagi kepentingan dirinya sendiri.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian adalah *financial distress* berpengaruh negatif pada praktik *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan akan menurunkan niat manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif pada praktik *tax avoidance*. Pengaruh positif ini memiliki arti ketika proporsi kepemilikan institusional meningkat, maka praktik *tax avoidance* akan meningkat. Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif pada praktik *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktik *tax avoidance* akan meningkat. Komite audit memiliki pengaruh yang positif pada praktik *tax avoidance*. Pengaruh positif disini memiliki arti ketika komite audit perusahaan mengalami peningkatan, maka *tax avoidance* akan meningkat.

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kembali di perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan yang berbeda. Nilai *adjusted R Square* yang rendah yaitu sebesar 19,9 persen menunjukkan bahwa adanya keterbatasan variabel independen yang digunakan dalam menjelaskan variabel dependen (*tax avoidance*). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat mendeteksi adanya tindakan *tax avoidance* seperti kepemilikan manajerial, profitabilitas, CSR, dan *capital intensity ratio*.

## REFERENSI

- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2011). *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, Third Edition*. *Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt, Third Edition*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95-189.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088-2116.
- Brondolo, J. (2015). Collecting Taxes During an Economic Crisis: Challenges and Policy Options. *IMF Staff Position Notes*, 2009(17), 2.
- Carlson, S. J., & Bathala, C. T. (1997). Ownership differences and firms' income smoothing behavior. *Journal of Business Finance and Accounting*, 24(2), 179-196.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 13(1), 50-67.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011 ). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting & accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127-178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness, 1-42.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525-539.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147-159.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. *Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi*

- Universitas Indonesia*, 1, 1-28.
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84-92.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703-718.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014*, 1-27.
- Radifan, R. (2015). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress, 1-71.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221-241.
- Reza, F. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi Ilmiah Universitas Indonesia*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53.
- Santoso, T. B. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(Semarang: Universitas Diponegoro), 1-37.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey Of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(1), 35-55.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Aggressiveness. *Hong Kong Baptist University*, 18(6), 2691-2697.